

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

Oleh:
FAJAR JAMI
NIM. E01112088

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email : bronxfajar@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang belum berjalan dengan optimal. Permasalahan yang terjadi yaitu komunikasi yang belum berjalan dengan optimal. Selain itu, masih banyaknya petani yang belum mendapatkan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten ketapang. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari faktor komunikasi yaitu proses penyampaian informasi yang masih kurang optimal kepada petani mengenai kebijakan pupuk bersubsidi. Dilihat dari faktor Sumberdaya yaitu terutama sumberdaya manusia (*staff*)/pegawai dalam melaksanakan penyuluhan, sosialisasi maupun pengawasan dilapangan kepada petani di Kecamatan Muara Pawan sudah cukup memadai. Dilihat dari faktor Disposisi/sikap agen pelaksana yaitu untuk agen pelaksana kebijakan (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang) sudah cukup baik dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pupuk bersubsidi namun Untuk sikap petani yaitu masih ada petani yang masih kurang peduli dengan adanya kebijakan tersebut dikarenakan masih adanya petani yang tidak mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang mengenai penyampaian informasi tentang kebijakan pupuk bersubsidi. Di lihat dari faktor Struktur birokrasi yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang bekerja sesuai dengan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan tidak ada penyelewengan dari SOP tersebut serta tidak ada pemberian insentif (bonus/penghargaan) khusus kepada pegawai.

Kata-kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pupuk bersubsidi, Petani

THE IMPLEMENTATION OF SUBSIDIZED FERTILIZER POLICY IN KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

Abstract

The aim of this research was to investigate and identify factors that resulted in the implementation of subsidized fertilizer policy in Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang which had not been implemented maximally. The problem of the research was about the communication which had not been optimally done. Besides that, most of the farmers did not get the distribution of the subsidized fertilizer in Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. The theory used in this research was Edward III theory which had 4 factors that influenced it, consisted of communication factors, resources factors, disposition factor, and bureaucracy factor. This was a descriptive research with qualitative approach. The result of the research showed that according to communication factor, the process of spreading the information had not been optimal to the farmers regarding subsidized fertilizer policy. According to resource factor, especially human resource (*staff/employee*) who did the socialization including field supervision toward the farmers in Kecamatan Muara Pawan had been adequate. According to disposition factor/ agent behavior,

that was implementing agency policy (Department of Agriculture and Animal Husbandry) had been satisfied in responding the problems related to subsidized fertilizer policy, but the farmers did not really paid attention on the existence of the policy due to farmers who did not participate in some seminar held by Department of Agriculture and Animal Husbandry Kabupaten Ketapang which had information session about subsidized fertilizer policy. According to the structure of bureaucracy, Department of Agriculture and Animal Husbandry Kabupaten Ketapang worked based on standard operating procedure (SOP) which had been stated and there was no misappropriation from the SOP, and there was no additional wage toward the employee.

Key Words : Policy Implementation, Subsidized Fertilizer, Farmers

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara agraris memiliki kondisi wilayah yang subur dan dengan iklim yang mendukung, sehingga menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Namun selama ini keadaan petani seringkali tidak diuntungkan dengan adanya berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka, misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak, terpuruknya harga gula serta mahalny biaya pupuk. Mahalnya harga pupuk sebagai salah satu komponen penting dalam produksi pertanian membuat pemerintah memberikan subsidi pada pupuk yang dituangkan dalam keputusan Menperindag No. 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Jika ditinjau dari SK Menperindag No. 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi untuk sektor pertanian ditegaskan produsen pupuk wajib mengutamakan pengadaan pupuk untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sektor pertanian.

Kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani diusahakan memenuhi azas enam tepat yaitu: tempat, jenis, waktu, jumlah, mutu dan harga yang layak sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan. Untuk mendukung itu, pemerintah kembali memberikan subsidi pupuk ke petani melalui pabrik pupuk yaitu berupa subsidi gas sebagai bahan baku utama produksi pupuk, dengan harapan harga pupuk yang diterima petani sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Subsidi gas diberikan pada ke lima pabrik di Indonesia sesuai SK Permentan Nomor : 60/SR.310/12/2015 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2016. Beberapa hal yang sangat penting yang tertera dalam surat keputusan

tersebut seperti dinyatakan bahwa : (a). bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; (b). bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; (c). bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

Dan diperkuat lagi dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 30 tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016. Perbub tersebut telah mengatur secara jelas instansi dan lembaga apa yang ditugasi mengawasi pelaksanaan penyaluran pupuk di lapangan. Termasuk diantaranya membuat ruang cukup bagi Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pertanian untuk terlibat dalam pengawasan. namun sampai saat ini petani belum dapat merasa kesejahteraan sebagai petani, harga pupuk yang mahal menghambat produksi pertanian. Peruntukan pupuk bersubsidi

dalam pasal 2 dijelaskan bahwa (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang. (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Sedangkan untuk penyaluran dan HET pupuk bersubsidi tercantum pada pasal 1 yaitu : (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik Granul yang diadakan oleh Produsen. Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CV. Agro Makmur Mandiri, Inkoptan Kalbar, PT. Pertani, dan PT. Universal Prima Indomandiri. Pada Pasal 10 diuraikan bahwa pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus. Sedangkan pada Pasal 9 dikemukakan bahwa (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
- b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
- c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
- d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg.
- e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai. Dalam Pasal 8 diuraikan bahwa produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Kemudian pada Pasal 8 dinyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sistem pendistribusian pupuk yang diterapkan selama ini belum cukup efektif dalam upaya memenuhi enam azas tepat yang selama ini menjadi target pemerintah dan para pelaku lainnya dalam mendistribusikan pupuk ke

tingkat petani. Ada beberapa hal yang diduga sebagai penyebab terjadi pendistribusian pupuk tidak sesuai dengan rencana. *Pertama*, pemakaian pupuk urea di tingkat petani melebihi dosis anjuran. Dalam perhitungan subsidi pupuk, dosis pemupukan urea yang dianjurkan pemerintah hanya sebanyak 250 kg/ha, akan tetapi dalam prakteknya banyak petani menggunakan pupuk jenis ini berkisar 350-500 kg/ha. Penggunaan pupuk berlebih terjadi karena petani masih beranggapan bahwa pupuk urea merupakan pupuk pokok dan mutlak diperlukan, sementara pupuk lainnya seperti SP36 dan KCl hanya merupakan pupuk pelengkap. Sehingga seringkali dijumpai banyak petani yang tidak menggunakan pupuk KCl di samping karena harganya memang relatif mahal. *Kedua*, pemilikan lahan yang sempit (< 0.3 ha) juga menyebabkan penggunaan pupuk kalau dikonversi ke dalam satu hektar menjadi sangat tinggi. *Ketiga*, tidak adanya ketepatan dalam menghitung luas pertanaman komoditas pangan (padi). Jumlah rencana kebutuhan pupuk yang ditetapkan Departemen Pertanian yang merupakan usulan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten secara umum lebih rendah dari luas pertanaman sesungguhnya,

sehingga jumlah permintaan pupuk selalu melebihi dari yang dialokasikan.

Keempat, adanya ketidak disiplin petani dalam menentukan pola tanam. Sebagai contoh, pada daerah tertentu yang biasanya menanam padi dua kali, ketika begitu masih ada persediaan air yang mencukupi pada gadu dua (MK II) petani pada umumnya menanam padi lagi, sehingga terjadi lonjakan permintaan pupuk. Kebutuhan pupuk pada tanaman hortikultura juga sangat sulit untuk dihitung, mengingat jenis komoditas yang ditanam petani tidak pasti dan selalu berubah-ubah sesuai permintaan pasar. *Kelima*, terjadi penggunaan pupuk di tingkat petani untuk kebutuhan yang bukan bersubsidi.

Sehingga dapat dikatakan tujuan kebijakan subsidi pupuk yang pada intinya untuk kesejahteraan petani serta kesinambungan usaha taninya, masih terkendala pada ketidaktepatan azas enam tepat di lapangan dan sistem distribusi pupuk yang masih belum teratur dan konsisten.

Kondisi ini sangat disayangkan dan memprihatinkan mengingat hal ini menyangkut kebutuhan pokok. Kesejahteraan petani kecil terutama kita lihat kondisi perekonomian yang masih perhatian, belum lagi kenaikan BBM yang

membebankan transportasi mengangkut hasil pertanian, hal ini banyak merugikan para petani. Berdasarkan Keputusan Bupati, Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sebanyak 1.377,3 ton, dengan rincian tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data Alokasi Pupuk Bersubsidi Per Bulan
Untuk Sektor Pertanian di Kecamatan
Muara Pawan Kabupaten Ketapang
Tahun Anggaran 2016

No	Jenis Pupuk	Bulan/Ton												Jumlah (Ton)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Urea	48,00	25,00	28,00	39,00	31,00	24,00	14,00	25,00	14,00	38,00	48,00	50,00	384,00
2	ZA	3,75	3,25	3,55	3,00	3,30	3,40	0,85	1,00	0,70	3,25	3,30	3,55	32,90
3	SP-36	17,00	11,00	13,00	19,00	28,00	10,00	8,00	10,50	6,00	7,50	10,50	6,50	147,00
4	NPK	76,00	57,00	66,00	71,00	54,00	48,50	33,00	53,00	31,00	46,50	29,25	71,00	636,25
5	Organik	16,50	8,00	16,40	15,50	16,35	18,00	9,15	20,50	9,00	16,50	16,25	15,00	177,15
Jumlah (Ton)														1377,3

Sumber: Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sebanyak 1.377,3 ton namun pada kenyataannya tidak tersedia pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. Petani kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi dikarenakan ketidak tersediaan pupuk bersubsidi baik

pada tingkat kelurahan maupun kecamatan. Ketidak tersediaan pupuk bersubsidi ini dikarenakan tahap pemrosesan yang terlalu lama, hingga bulan November ini petani belum mendapatkan pupuk bersubsidi padahal musim tanam padi sudah lewat sehingga petani terpaksa menggunakan pupuk non bersubsidi dan ini memberatkan pihak petani.

Kabupaten ketapang secara administratif dibagi menjadi 20 Kecamatan, sedangkan di Kota Ketapang nya itu sendiri terdapat 3 daerah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Delta pawan, Kecamatan Benua Kayong, dan Kecamatan Muara Pawan. Dalam penelitian ini penulis meneliti masalah mengenai implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. Kecamatan Muara Pawan itu sendiri terdiri dari 8 desa, yakni: desa Sungai Awan Kanan, desa Sungai Awan Kiri, desa Tempurukan, desa Tanjung Pura, desa Ulak Medang, desa Mayak, desa Tanjung Pasar dan desa Suka Maju. Untuk lebih memperinci masalah yang diteliti penulis memfokuskan masalah yang diteliti hanya pada satu desa yaitu pada desa Sungai awan Kanan saja. Di desa Sungai Awan Kanan terdapat 4 Kelompok tani yakni: kelompok Tani Dewi Rati, kelompok Tani awan mandiri, Kelompok

Tani Muara Sejahtera , dan kelompok Tani Karya Sari yang mana dari 4 kelompok tani tersebut memiliki total jumlah petani sebanyak 58 orang petani secara keseluruhan.

Alur pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang nomor 30 tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2016 di Kabupaten Ketapang adalah dimulai dari bawah yakni dari petani dengan mengajukan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) kemudian diteruskan kepada pengecer dan kemudian diajukan kepada distributor. Sedangkan alur pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER//2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian adalah sebagai berikut: Produsen-distributor-pengecer. Produsen adalah pemerintah pusat, distributor berada di kabupaten sedangkan pengecer berada di setiap kecamatan.

Permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi di desa Sungai Awan Kanan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang ini terjadi diantara pihak pengecer dengan petani, pengecer tidak amanah dalam

menjalankan tugasnya yang mana pengecer selain menjual pupuk bersubsidi diluar harga yang telah ditetapkan pengecer juga menjual pupuk bersubsidi kepada pihak lain yang mau membayar dengan harga yang lebih tinggi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang belum berjalan secara optimal.

B. KAJIAN TEORI

Kebijakan publik menurut Kartasasmita (dalam Widodo, 2008:12), “merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut”.

Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Anderson (dalam Widodo, 2008:13) bahwa “kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”.

Easton (dalam Abidin, 2002:41), mengemukakan kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses manajemen, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2002:5) kebijakan publik pada dasarnya adalah “suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

Dalam kehidupan administrasi Negara, secara formal, keputusan itu lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan”. Maka kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang diambil pemerintah, untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

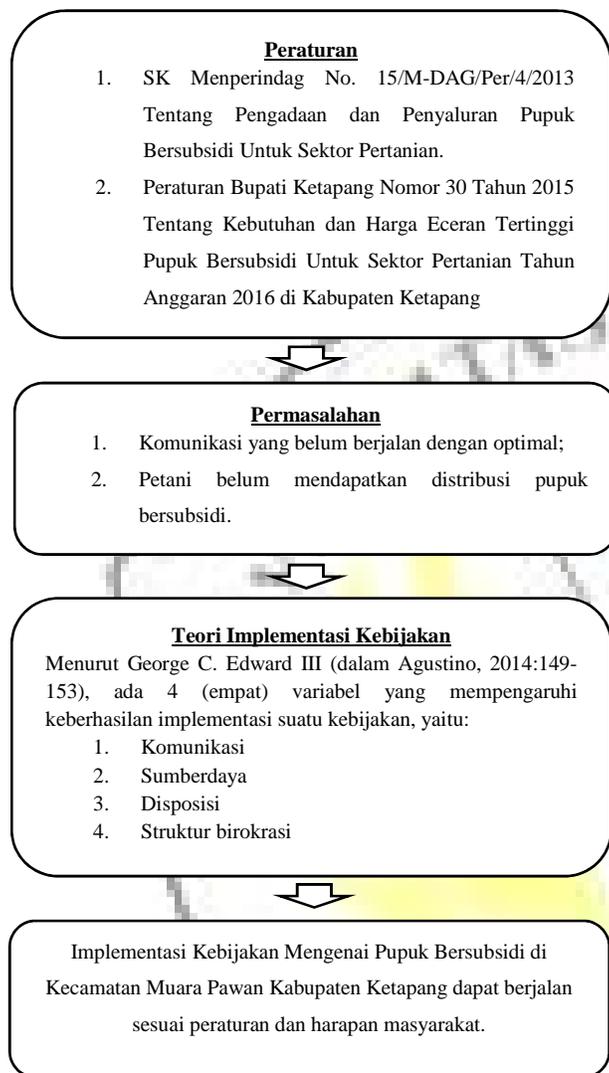
Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2014:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:139) mengemukakan “implementasi kebijakan

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) atau pejabat-pejabat ataupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dalam menganalisis Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang peneliti akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2014:149-153), ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kerangka Pikir Penelitian



Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (dalam Sugiyono, 2007:20) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai

suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antara variabel.

Dalam membantu dan mempermudah penulis mengumpulkan serta mendapatkan data dan fakta di lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yakni: Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data (*display*), dan verifikasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut kurang efektif, yang dilandasi oleh George C. Edward III, yakni ada 4 (empat) faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan menurut Edward III sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan). Komunikasi antar organisasi yang terkait sebagai pelaksana kebijakan sangat penting untuk menunjang efektivitas implementasi. Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika para pelaksana yang terlibat dalam implementasi mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan. Hal ini mengandung makna bahwa mereka yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan publik harus melakukan komunikasi dengan baik karena dengan berkomunikasi secara baik mereka akan mengetahui dan memahami apa yang harus dilaksanakan serta bagaimana cara melaksanakannya.

Terdapat 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu: “(1). Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan, (2). Kejelasan, maksudnya adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua, (3). Konsistensi, yaitu jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.”

2. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan sumberdaya yang berperan serta dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

a. *Staff*; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi,

memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. *Informasi*, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. *Wewenang*, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka serint terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektifitas akan menurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. *Fasilitas*, yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan/digunakan bagi badan/instansi dalam mengimplementasikan kebijakan dalam suatu masyarakat.

Ketersediaan sumber daya dalam suatu organisasi juga merupakan suatu hal yang harus dimiliki dan berpengaruh besar terhadap pencapaian keberhasilan

implementasi kebijakan. Sumber kebijakan mempunyai makna yang cukup luas, sumber-sumber yang tersedia atau terlibat dalam implementasi kebijakan selain dukungan pendanaan implementasi kebijakan juga mencakup orang-orang yang mempunyai kompetensi yang memadai dari segi jumlah dan kemampuan, sarana dan prasarana termasuk akses terhadap informasi yang jelas dan cepat.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah:

a. *Pengangkatan birokrat*; dalam pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. *Insentif*; pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah

kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

E. KESIMPULAN

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat penulis kemukakan dari implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang:

1. Faktor komunikasi terutama dalam transmisi atau penyampaian

informasi mengenai kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang belum berjalan dengan optimal, sehingga masih ada petani yang tidak mengetahui adanya informasi mengenai kebijakan pupuk bersubsidi serta mereka juga tidak mengerti akan maksud dan tujuan dari informasi tersebut.

2. Faktor sumberdaya sudah memadai terutama yaitu jumlah pegawai dalam sumberdaya manusia (*staff*)/pegawai yang berkerja sebagai petugas penyuluhan lapangan sudah cukup sehingga dalam melaksanakan penyuluhan, sosialisasi maupun pengawasan pupuk bersubsidi terhadap kelompok tani berjalan dengan maksimal.
3. Faktor disposisi atau sikap agen pelaksana yaitu disposisi/sikap Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang sudah cukup baik namun yang menjadi kendala adalah masih ada petani yang masih kurang peduli terhadap informasi mengenai kebijakan pupuk bersubsidi, sehingga menghambat kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang dalam menyampaikan

informasi kebijakan pupuk bersubsidi tersebut.

4. Faktor Struktur Birokrasi dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

E. SARAN

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang kepada Petani Kecamatan Muara Pawan dalam proses penyampaian informasi mengenai kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan lebih dioptimalkan.
2. Faktor sumberdaya terutama sumberdaya manusia (pegawai) meskipun sudah baik namun lebih dioptimalkan dengan cara menambah jumlah pegawai sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam melaksanakan pengawasan kebijakan

pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan sehingga berjalan dengan optimal.

3. Faktor disposisi para pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang lebih ditingkatkan menangani setiap permasalahan yang terjadi mengenai kebijakan pupuk bersubsidi sehingga bisa tertangani/teratasi dengan optimal.
4. Struktur birokrasi yang ada meskipun sudah baik tetapi harus ditingkatkan lagi agar para pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang bekerja dengan lebih baik dan maksimal sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat kekurangan, khususnya berkaitan dengan kedalaman data yang diperoleh. Keterbatasan yang peneliti rasakan yakni waktu yang dimiliki informan sehingga dalam wawancara ada beberapa informan memberikan pendapat atau pernyataan dengan sangat sederhana (singkat) dan tidak mendalam. Hal ini menyebabkan data yang diperoleh kurang lengkap.

G. REFERENSI

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

_____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Mustopadidjaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wahab. 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Zainal, S, Abidin. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.

Dokumen Pemerintah

Keputusan Memperindag No.15/M-DAG/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Permentan Nomor: 60/SR.310/12/2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Untuk Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Bupati Ketapang Nomor: 30 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

Jurnal Dan Rujukan Elektronik

Joko Purnama. 2011. *Studi Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tuban*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada

Frisa Susiana. (2010). *Implementasi Peraturan Daerah No 489 Tahun 2008 Mengenai Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang*. Pontianak : FISIP Universitas Tanjung Pura.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : FAJAR JAMI
 NIM / Periode lulus : E.01112088 / PERIODE 2
 Tanggal Lulus : 11-01-2017
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 E-mail address/ HP : bionx.fajar@gmail.com / 085215477277

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PUBLIKA (*) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POKK BERSUBSIDI DI KECAMATAN MUARA PAWAN
KABUPATEN KETAPANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara *fulltext*

content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

Dr. PARDI B. Sos., M. A.B.
 NIP. 1972.090520.02121003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 19 JANUARI 2017

Fajar Jami
 FAJAR JAMI
 NIM. E.01112088

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

